

**KINERJA ANGGARAN KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH DI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH SETDA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**TRIANSYAH ARBI SAPUTRA
NIM. 07011181621041**

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Januari, 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KINERJA ANGGARAN KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH DI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

TRIANSYAH ARBI SAPUTRA
07011181621041

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2020

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Kinerja Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 30 Januari 2020.

Inderalaya, 30 Januari 2020

Ketua

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

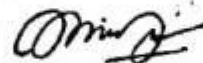


Anggota

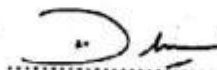
1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

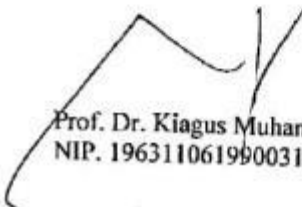


3. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002



Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Dilahirkan Untuk Jadi Pemenang, Bukan Jadi Pecundang ”

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini
saya persembahkan untuk:**

- ✓ Kedua Orangtuaku, Ayahanda Sulistyو dan Ibunda Rokhimah
- ✓ Keluargaku, Saudaraku, Serta Kakak dan Adikku Seviana Lismawati, Fendri Dwi Prakasa dan Rice Deva Saptalia Rahmawati
- ✓ Tim Akreditasi Jurusan Administrasi Publik
- ✓ Teman-teman Seperjuanganku dan Organisasi
- ✓ Keluarga Kecil Diperantauan KEMALA UNSRI
- ✓ Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena, yaitu penyusunan dengan berbagai jenis laporan yang diwajibkan di dalam peraturan perundang-undangan yang memerlukan banyak biaya, jika laporan yang dihasilkan hanya menjadi simbol akuntabilitas saja bagi pengguna belum optimal maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut kenapa hal itu terjadi dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi itu. Fenomena tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model teori anggaran berbasis kinerja yang dikemukakan oleh Anggraini dan Puranto yang terdiri dari *input, process, output, outcome, benefit, dan impact* sebagai alat analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja anggaran pada kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan belum dapat dikatakan maksimal atau belum terlaksana dengan baik. Saran berkaitan dengan temuan dari kendala yang diuraikan sebelumnya, yaitu perlu ditingkatkan lagi koordinasi, perlunya penyebaran laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ke setiap OPD dan publik sehingga OPD dan masyarakat dapat mengakses, perlu ditingkatkan sumber daya manusia dengan cara berbagai sosialisasi kegiatan kepada pegawai seperti agenda diklat, pelatihan, penyuluhan serta tingkatkan lagi pengawasan.

Kata Kunci : Kinerja, Anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.19691191998032001

Indralaya, Januari 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



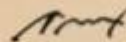
Taitani Susri Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon, namely the number of incoming and outgoing budgets is the same, the preparation of various types of reports required by law requires a lot of costs, if the report produced is only a symbol of accountability for users is not optimal then it is necessary to further analyze why it happened and what efforts can be made to improve that condition. The phenomenon is regulated in Law No. 9 of 2015 about Regional Government, Article 69 paragraph (1) states that the Regional Head is obliged to submit a Regional Government Implementation Report, Accountability Statement Report and Summary of Regional Government Implementation Report. This research was conducted in Bureau of Governance and Regional Autonomy of the Regional Secretariat of South Sumatra Province. This type of research is descriptive using qualitative research methods. The types used are primary and secondary data, while data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. This research uses a performance-based budget theory model stated by Anggraini and Puranto consisting of inputs, processes, outputs, outcomes, benefits, and impacts as an analysis tool. The results of this research indicate the performance of the budget in the preparation of regional government implementation reports in the Bureau of Government and Regional Autonomy Regional Secretariat of South Sumatra Province has not been maximized or has not been well spent. Suggestions related to the obstacles outlined previously, namely to improve coordination, the need to disseminate reports on the implementation of regional government to each OPD and the community, so that OPD and the community can access. Human resources need to be improved through various socialization activities for employees such as the education agenda, training, counseling and increasing supervision again.

Keywords: *Performance, Budget, Implementation Report Regional Government.*

Advisor I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

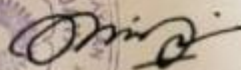
Advisor II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.19691191998032001

Indralaya, January 2020

Head of Public Administration Department
Faculty of Sosial and Political Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT., sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “Kinerja Anggaran Kegiatan Penyusunan LPPD di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sumatera Selatan”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sulistyono dan Ibu Rokhimah yang sangat mendukung dan selalu memberikan doa serta menjadi penyemangat untukku.
2. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan FISIP UNSRI.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
4. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing 2 dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Keluarga Besar Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sumatera Selatan.
7. Seluruh staf beserta karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
8. Saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.
9. Seluruh kerabat dan sahabat penulis yang mendukung proses Skripsi ini, Teman-teman Jurusan Administrasi Publik.
10. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sedari awal hingga penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Januari 2020
Penulis

Triansyah Arbi Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Praktis	5
2. Manfaat Teoritis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Landasan Teori	6
1. Pengertian Keuangan Negara	6
2. Keuangan Daerah	7
3. Kinerja Anggaran	9
4. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10
5. Teori Kinerja	12
6. Teori yang Digunakan	15
B. Penelitian Terdahulu	16
C. Kerangka Pemikiran	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Definisi Konsep	20
C. Fokus Penelitian	21

D. Unit Analisis Data	22
E. Informan Penelitian	22
F. Data dan Sumber Data	23
G. Teknik Pengumpulan Data	24
H. Teknik Analisis Data	25
I. Sistematika Penulisan	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan	29
a. Letak dan Kondisi Geografis	30
b. Topografi	31
c. Geologi	32
d. Hidrologi	32
2. Sejarah Singkat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	33
a. Visi dan Misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	33
b. Tugas Pokok dan Fungsi	34
c. Struktur Organisasi	35
B. Hasil dan Pembahasan	44
1. Masukan (<i>input</i>)	47
a. Finansial	47
b. Sumber Daya Manusia	50
c. Sarana dan Prasarana	51
2. Proses (<i>proses</i>)	53
3. Keluaran (<i>output</i>)	55
4. Hasil (<i>outcome</i>)	58
5. Manfaat (<i>benefit</i>)	60
6. Dampak (<i>impact</i>)	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	3
Tabel 2 Data Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Penyusunan LPPD	4
Tabel 3 Penelitian Terahulu	12
Tabel 4 Variabel Kinerja Anggaran Kegiatan Penyusunan LPPD	21
Tabel 5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
Tabel 6 Kelengkapan Sarana dan Prasarana	52
Tabel 7 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja	55
Tabel 8 Data Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Penyusunan LPPD	56
Tabel 9 Dokumen Pelaksanaan Anggaran	62
Tabel 10 Data Laporan Realisasi	62
Tabel 11 Data Sisa Anggaran	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran	19
Gambar 2. Peta Provinsi Sumatera Selatan	29
Gambar 3. Struktur Pengurusan	35
Gambar 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	48
Gambar 5. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Belanja	49
Gambar 6. Bukti Laporan LPPD	58
Gambar 7. Laporan LPPD	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pembimbing
2. SK Skripsi
3. Surat Izin Penelitian
5. Surat Balasan Izin Penelitian
6. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Sekripsi
7. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
8. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
9. Pedoman Wawancara
10. Pedoman Penyusunan LPPD

DAFTAR SINGKATAN

1. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. ATK : Alat Tulis Kantor
3. BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. BAPPENDA : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. BPKAD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. DVD : *Digital Versatile Disc*
7. IKK : Indikator Kinerja Kunci
8. IKU : Indikator Kinerja Utama
9. LKPI : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
10. LPPD : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. MTEF : *Medium Term Expenditure Framework*
12. OPD : Organisasi Perangkat daerah
13. PAD : Pendapatan Asli Daerah
14. PBB : *Performance Based Budget*
15. RENSTRA : Rencana Strategis
16. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. RLPPD : Ringkasan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
18. RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
19. SETDA : Sekretariat Daerah
20. SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
21. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
22. SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (pp 3/2007). LPPD Kabupaten/kota diserahkan oleh bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur. LPPD berisi informasi tentang gambaran umum daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LPPD ini merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hierarki antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga kegiatan Pemerintah Daerah tetap menjadi rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan pemerintah secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, oleh karena itu pengaturan mengenai pelaporan tidak hanya dalam rangka desentralisasi, tetapi sekaligus juga mengatur laporan dalam rangka desentralisasi dan tugas pembantuan, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangannya sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan bahan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah.

Kedudukan LPPD sangat penting bagi terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemerintah, maka dari itu Penyusunan LPPD ini perlu diterapkan sebagai bagian dari inovasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah. Sumber informasi LPPD difokuskan pada informasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Ukuran kinerja sektor publik dilaksanakan agar memenuhi tiga faktor. Pertama, membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja yang dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada sasaran dan tujuan pelaksanaan program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan sebuah keputusan. Ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).

Dalam sebuah organisasi anggaran memegang peran yang sangat penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program suatu administrasi. Oleh karena itu kinerja anggaran organisasi dalam hal pengelolaan anggaran sangat diperlukan. Anggaran dilaksanakan pada

periode satu tahun kedepan yang tentunya mengacu pada anggaran dan realisasi yang dicapai sebelumnya yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur pembuatan anggaran di tahun berikutnya tanpa adanya suatu kejelian dalam menganalisa suatu anggaran yang akan dibuat maka tidak akan didapat realisasi yang sesuai dalam sebuah anggaran keuangan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sumatera Selatan yang tentunya akan berimbas pada kurang optimalnya hasil pencapaian kinerja.

Berikut dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018.

Tabel 1 Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018.

Tahun	Uraian	Jumlah
2017	Belanja alat tulis kantor	Rp. 5.000.000
	Belanja jasa kantor	Rp. 10.000.000
	Belanja cetak dan penggandaan	Rp. 35.000.000
	Belanja perjalanan dinas	Rp. 80.000.000
Total		Rp. 130.000.000
2018	Belanja alat tulis kantor	Rp. 2.000.000
	Belanja jasa kantor	Rp. 47.000.000
	Belanja cetak dan penggandaan	Rp. 40.000.000
	Belanja makanan dan minuman	Rp. 20.000.000
	Belanja perjalanan dinas	Rp. 191.000.000
Total		Rp. 300.000.000

Sumber: Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2018

Data diatas merupakan laporan pertanggungjawaban pada kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2017-2018. Dalam laporan tersebut, jumlah anggaran yang masuk dan anggaran yang dikeluarkan sama. Artinya tidak ada sisa anggaran dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini. Akan tetapi pada laporan realisasi rincian anggaran pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tidak mencapai target realisasi.

Berikut terdapat laporan realisasi rincian anggaran pelaksanaan kegiatan penyusunan olaporan penyelenggaraan pemerintah daerah pada biro Pemerintahan dan otonomi daerah:

Tabel 2 Data Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Penyusunan LPPD di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sumatera Selatan 2017-2018.

No	Tahun	Target Penggunaan Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2017	130.000.000	129.873.277	99,90
2	2018	300.000.000	274.307.385	91,44

Sumber: Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2018

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat penyediaan dana dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) bahwa setiap kegiatan masing-masing telah ditentukan penggunaan anggarannya, dari anggaran kegiatan tersebut dapat kita lihat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan sudah baik atau belum. Karena didalam sebuah organisasi atau instansi baik pemerintahan ataupun swasta anggaran memiliki peran penting dalam kelancaran suatu organisasi atau instansi. Pada kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) target penggunaan anggaran mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 penggunaan anggaran penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah berjumlah Rp.130.000.000 dan pada tahun 2018 penggunaan anggaran penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah mencapai Rp.300.000.000. Akan tetapi realisasi dari tahun 2017 dan tahun 2018 tidak pernah mencapai target yang telah disediakan. Pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp.129.837.277 setara dengan 99,9% dan pada tahun 2018 realisasi mencapai Rp.274.307.385 setara dengan 91,44%.

Penelitian ini penting dilakukan karena penyusunan berbagai jenis laporan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan memerlukan banyak biaya, jika laporan yang dihasilkan hanya menjadi simbol akuntabilitas saja (Mimba etal, 2013) dan kebermanfaatannya bagi pengguna belum optimal (Martiningsih, 2008) maka perlu

dilakukan analisis lebih lanjut kenapa hal itu terjadi dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi itu. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji dan melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan judul “Kinerja Anggaran Penyusunan LPPD di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana Kinerja Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sumatera Selatan?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Instansi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan semua Instansi yang terlibat didalamnya dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan konsentrasi Keuangan Negara mengenai Bagaimana Kinerja Anggaran Kegiatan Penyusunan LPPD di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggraini, Yunita & B. Hendra Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Halim, Abdul & Muhammad Iqbal. 2012, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Lionardo Andries. 2011. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Tunggal Mandiri.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pres
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Singarimbun dkk. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3es
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2013. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.

JURNAL

- Assidiqi, Bahrnun. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*
- Faqihuddin, 2012. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik*.
- Palimbongan, Rexy, 2019. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon*. 2303-1174

PERATURAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SE.120.04/5043/Otda Tentang Penyusunan LPPD
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah perubahan kedua

SKRIPSI

Lusiani, Desti 2019. *Kinerja Anggaran Kegiatan Ekstensifikasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur*. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik